



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ARY WIDIYANTORO
NIK : 3374150503800006
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Kerja : BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
PEGAWAI
Jabatan : KEPALA SUBBIDANG JABATAN STRUKTURAL
Jenis Laporan : Periodik - 2018
Tanggal Kirim : 4 Maret 2019

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap

Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARY WIDIYANTORO
2. Jabatan : KEPALA SUBBIDANG JABATAN STRUKTURAL
3. NHK : 252969

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 560.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m2/10 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 257.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
55.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
195.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.880.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 154.761.459

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.001.641.459

III. HUTANG Rp. 182.154.927

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 819.486.532

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.